SKRIPSI

IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA HILIR KANTOR KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

Program Studi :

ADMINISTRASI PUBLIK

Kajian:

KEBIJAKAN PUBLIK

Ditulis Oleh:

LAMSIHAR HASOHOTAN TAMBUN
E1012181018

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNPURA

PONTIANAK

2025

SKRIPSI

IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA HILIR KANTOR KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Kajian Kebijakan Publik

Oleh :

Lamsihar Hasohotan Tambun

E1012181018

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNPURA

PONTIANAK

2025

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA HILIR KANTOR KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Lamsihar Hasohotan Tambun
NIM. E1012181018

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Pertama

Dr. Ira Patriani, S.IP, M.Si Tanggal.....

NIP. 197611302003122001

Dosen Pembimbing Kedua

Martinus, S.Sos, M.Si Tanggal.....

NIP. 197212272006041002

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA HILIR KANTOR KECAMATAN NGABANG KABUPATENLANDAK

Oleh :

Lamsihar Hasohotan Tambun
E1012181018

Dipertahankan di	: Pontianak
Pada Hari/Tanggal	: Kamis, 31 Juli 2025
Waktu	: 11:00 -Selesai
Tempat	: Ruang Seminar & Sidang Fisip Untan

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Ira Patriani, M.Si	Martinus, S.Sos, M.Si
NIP. 197611302003122001	NIP. 97212272006041002
Penguji Utama	**Penguji Pendamping**
Dr. Julia Magdalena Wuysang, M.Si	Dr. Yulius Yohanes, M.Si
NIP. 196209291989032001	NIP. 196405271992021001

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr.Herlan, M.Si
NIP.197205212006041001

ABSTRAK

LAMSIHAR HASOHOTAN TAMBUN (NIM. E1012181018). Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan (BPD) di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. **Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik. Universitas Tanjungpura. 2025.**

Penelitian ini bertjuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Fungsi Badan Permusyaratan Desa (BPD) di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Masalah dalam penelitian ini adalah Komunikasi kurang optimal antara BPD Desa Hilir Kantor dengan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kerja pemerintah desa. Tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Hilir Kantor relatif rendah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edwards III (dalam Riant Nugroho, 2009:636) yang terdiri dari: 1) Komunikasi, transmisi dan konsistensi dalam penyampaian Implmentasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak masih berlum berjalan secara optimal. 2) Sumber Daya, anggota BPD Desa Hilir Kantor masih rendah, dari kelima anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya 2 orang saja yang berpendidikan Sarjana (S1) sedangkan yang lainnya hanya tamatan SMA. Serta sarana dan prasarananya yang kurang memadai. 3) Disposisi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Serta sarana dan prasarananya yang kurang memadai. 4) Struktur Birokrasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak belum menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah perlu ditingkatkannya lagi kinerja dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Implementasi, Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa.

ABSTRACT

LAMSIHAR HASOHOTAN TAMBUN (ID. E1012181018). The Implementation of Functions of the Village Consultative Body (BPD) in Hilir Kantor Village of Ngabang District in Landak Regency. **Thesis. Public Administration Study Program. Social and Political Sciences Faculty. Universitas Tanjungpura. 2025.**

This study aimed to describe and analyse the implementation of functions of the Village Consultative Body (BPD) in Hilir Kantor Village of Ngabang District, Landak Regency. The issues of this study were the communication, which was not optimal between the BPD of Hilir Kantor Village and the community in the implementation of functions in accommodating and channeling community aspirations, the lack of facilities and infrastructure to support the work of the village government, and the relatively low level of education of members of the BPD of Hilir Kantor Village. This study employed a qualitative research method with a descriptive analysis research design. This study also employed George C. Edwards III's theory (*op. cit.* Riant Nugroho, 2009:636). Firstly, the results of this revealed that in communication, particularly the transmission and consistency of information regarding the implementation of the duties and functions of the BPD of Hilir Kantor Village in Ngabang District, Landak Regency, had not yet been conducted optimally. Secondly, in terms of resources, the capacity of BPD members in Hilir Kantor Village remained relatively low. From the five members of the BPD, only two held a bachelor's degree (S1), while the remaining members were high school graduates. Moreover, the available facilities and infrastructure were inadequate. Thirdly, regarding disposition, the BPD of Hilir Kantor Village in Ngabang District, Landak Regency, had not yet demonstrated optimal implementation of its duties and functions, which was further constrained by inadequate facilities and infrastructure. Lastly, in terms of bureaucratic structure, the BPD of Hilir Kantor Village in Ngabang District, Landak Regency, had not done its duties and functions in accordance with the established Standard Operating Procedures (SOPs). Therefore, the researcher suggests that the performance of the members of BPD of Hilir Kantor Village in Ngabang District, Landak Regency needs to be improved further so that they can do their duties and functions properly.

Keywords: Implementation, Function, Village Consultative Body (BPD).

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa, sedangkan Pemerintah Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa memerlukan sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang agar pemerintah desa tidak sewenang-wenang dalam menetapkan suatu peraturan. Lembaga yang dimaksud yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan mitra pemerintahan yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan dan masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi, terutama dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes).

Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut terdiri dari Kepala Desa, dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis untuk mengatur kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat diproses memalui pemilihan secara langsung atau melalui musyawarah perwakilan.

Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Dengan telah terlaksananya fungsi BPD secara maksimal tentu tidak terlepas dari berbagai rintangan dan kendala yang mereka lalui. Adapun kendala-kendala yang dialami BPD dalam mengimplementasikan fungsinya antara lain:

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, masih menghadapi berbagai hambatan signifikan. Komunikasi internal antaranggota BPD meskipun telah terbentuk, belum didukung oleh sistem kerja yang terstruktur dan berkelanjutan. Koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa juga masih minim dan tidak sistematis, menghambat sinergi dalam proses legislasi desa. Kurangnya kapasitas teknis, pedoman kerja yang jelas, serta

dukungan administrasi turut memperlemah kinerja BPD. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas, pembenahan komunikasi kelembagaan, dan penguatan koordinasi lintas sektor agar fungsi BPD dapat berjalan lebih optimal.

Dalam sumber daya, khususnya sumber daya manusia dan sumber daya finansial, menjadi hambatan utama dalam implementasi fungsi BPD di Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang. Rendahnya kapasitas anggota BPD menyebabkan kurang optimalnya peran dalam legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Selain itu, minimnya anggaran berdampak pada terhambatnya operasional dan pelaksanaan kegiatan strategis. Kurangnya pelatihan dan sarana pendukung memperparah lemahnya kinerja kelembagaan. Tanpa penguatan SDM dan pendanaan yang memadai, BPD hanya akan menjalankan fungsi secara simbolik. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk mendukung efektivitas kelembagaan BPD.

Dalam disposisi atau sikap dan komitmen anggota BPD di Desa Hilir Kantor menjadi salah satu penghambat utama dalam implementasi fungsi kelembagaan. Rendahnya partisipasi aktif, kurangnya rasa tanggung jawab, dan lemahnya motivasi menjadi hambatan dalam proses legislasi desa. Minimnya pemahaman teknis serta absennya sistem evaluasi dan insentif memperparah

kondisi tersebut. Komitmen yang belum solid juga menyebabkan program desa kerap terhenti ketika menemui hambatan. Oleh karena itu, penguatan disposisi melalui pembinaan mental, pelatihan kepemimpinan, dan evaluasi berkala sangat diperlukan. Hal ini penting agar BPD dapat menjalankan peran secara optimal dalam merumuskan serta mengawal kebijakan desa.

Kemudiqn lemahnya struktur birokrasi yang ditandai dengan ketiadaan SOP, kerangka kerja, dan koordinasi yang jelas antara BPD dan Pemerintah Desa. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia anggota BPD turut memperburuk situasi, karena minimnya pemahaman terhadap tugas legislasi dan tata cara penyusunan peraturan desa. Ketiadaan pedoman kerja membuat fungsi-fungsi BPD cenderung berjalan informal dan tidak terstandarisasi. Hal ini menyebabkan lemahnya pengawasan, lambatnya proses legislasi, serta rendahnya keterlibatan substansial BPD dalam pembangunan desa. Diperlukan reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas, dan pembinaan intensif untuk memperkuat peran strategis BPD ke depan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Lamsihar Hasohotan Tambun
Nomor Mahasiswa	: E1012181018
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Fakultas	: Imu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis adalah hasil karya asli saya sendiri, bukan hasil karya orang lain dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di program studi, fakultas atau perguruan tinggi lain. Selama pengetahuan saya, skripsi ini tidak memuat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara jelas dirujuk dalam Daftar Pustaka di skripsi ini.

Pontianak, 24 Juli 2025

...at pernyataan



Lamsihar Hasohotan Tambun

NIM. E1012181018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Ketika kita tak menyerah, impian akan menjadi nyata serta tak ada yang lebih kuat dari hati yang tak menyerah. Percayalah setiap detik berharga sia-siakan karena setiap impian besar memerlukan usaha besar."

Persembahan :

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan dan doa dari orang tercinta, akhirnya Skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik dam tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada :

1. Sang Juru Selamat Yesus Kristus karena atas izin dan karunia-Nya lah maka skripsi ini di buat dan selesai pada waktunya.
2. Ayahanda Rudi Hartono Tambun dan ibundaYustina Br. Sitorus yang telah memberi dukungan moral dan maupun material serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
3. Kakak saya tercinta Florenny Hadri Anta Boru Tambun yang selalu memberi doa dan semngat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat saya yang selalu memberi dukungan penuh semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Idola saya Nancy Jewel McDonie yang setiap saya melihat foto nya selalu memberikan saya semangat lebih.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya akhirnya penulisan skripsi yang berjudul "Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak", ini dapat diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan meruoakan kewajiban penulis yang harus dipenuhi sebagai salah satu untuk mendapapkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

Keberhasilan dalam penulisan ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada penulis dalam nebyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Herlan, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Ira Patriani, S.IP, M.Si dan Martinus, S.Sos, M.Si. Selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan kemudahan dan arahan, memotivasi dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini, baik secara metodelogi penelitian serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

3. Dr. Julia Magdalena Wuysang, M.Si penguji utama, dan Dr. Yulius Yohanes, M.Si selaku dosen penguji pendamping yang telah banyak memberikan saran dan masukan guna kesempurnaan dalam skripsi.
4. Pihak-pihak lain yang telah memberi dukungan kepada saya namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan, dorongan dan Doa yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pontianak,24 Juli 2025

Lamsihar Hasohotan Tambun
E1012181018

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

ABSTRAK iii

RINGKASAN SKRIPSI v

PERNYATAAN KEASLIAN ix

MOTTO DAN PERSEMBAHAN x

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI xiii

DAFTAR GAMBAR xvi

DAFTAR TABEL xvii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1.Latar Belakang Penelitian 1

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian 5

1.3. Fokus Penelitian 6

1.4. Perumusan Masalah 6

1.5. Tujuan Penelitian 6

1.6. Manfaat Penelitian 6

1.6.1. Manfaat Teoritis 6

1.6.2. Manfaat Praktis 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA 8

2.1. Konsep 8

2.1.1. Kebijakan Publik 8

2.1.2. Konsep Implementasi 9

2.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik .. 14
2.1.4. Badan Permusyawaratan Desa 15
2.1.5. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 16
2.2. Hasil Penelitian yang Relevan 18
2.3. Kerangka Pikir 21
2.4. Pertanyaan Penelitian 22
BAB III METODE PENELITIAN 24
3.1. Jenis Penelitian 24
3.2. Langkah-Langkah Penelitian 25
3.3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 25
3.3.1. Lokasi Penelitian 25
3.3.2. Waktu Penelitian 26
3.4. Subjek dan Objek Penelitian 26
3.4.1. Subjek Penelitian 26
3.4.2. Objek Penelitian 26
3.5. Teknik Pengumpulan Data 27
3.6. Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 27
3.7. Analisis Data 29
3.7.1. Keabsahan Data 29
3.7.1. Teknik Analisis 30
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 32
4.1. Keadaan Geografis 32
4.1.1 Lokasi Wilayah Desa Hilir Kantor 32
4.1.2 Topografi 34
4.2. Keadaan Demografi 35

4.2.1 Jumlah Penduduk Desa Hilir Kantor Berdasarkan Usia 35

4.2.2 Jumlah Penduduk Desa Hilir Kantor Berdasarkan Agama / Kepercayaan 36

4.2.3 Jumlah Penduduk Desa Hilir Kantor Berdasarkan Jenis Kelamin 37

4.2.4 Jumlah Penduduk Desa Hilir Kantor Berdasarkan Pendidikan 38

4.3. Keadaan Sosial dan Ekonomi Desa Hilir Kantor 40

4.4. Sarana dan Prasarana Desa Hilir Kantor 42

4.5. Visi Misi dan Maklumat Pelayanan Pemerintahan Desa Hilir Kantor 43

4.5.1 Visi 43

4.5.2 Misi 43

4.6. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Hilir Kantor 44

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAAN 47

5.1 Hasil Penelitian 47

5.2 Pembahasaan 56

5.2.1 Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang 56

A. Komunikasi 56

B. Sumber Daya 60

C. Disposisi 64

D. Struktur Birokrasi 67

BAB VI PENUTUP 72

6.1 Kesimpulan 72

6.2 Saran 74

6.3 Keterbatasaan Penelitian 75

DAFTAR PUSTAKA 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 alur pikir penelitian 22

Gambar 4.1 Peta desa Hilir Kantor 33

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Hilir Kantor Berdasarkan Usia 36
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Hilir Kantor Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024 38
Tabel 4.3.Desa Hilir Kantor Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024 ... 39
Tabel 4.4. Desa Hilir Kantor Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2024 41
Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Desa Hilir Kantor Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2024 43

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa, sedangkan Pemerintah Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa memerlukan sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang agar pemerintah desa tidak sewenang-wenang dalam menetapkan suatu peraturan. Lembaga yang dimaksud yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan mitra pemerintahan yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan dan masukan dalam

membangun pemerintahan desa menjadi, terutama dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes).

Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut terdiri dari Kepala Desa, dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis untuk mengatur kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat diproses memalui pemilihan secara langsung atau melalui musyawarah perwakilan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai legislasi dan wadah yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada hakikatnya lembaga ini adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintahan Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Tentang Desa, dikatakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3. Melakukan Pengawasan kinerja Kepala Desa

Berdasarkan fungsi diatas, di dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting karena merupkan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa daoat dilihat dari beberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya.

Dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, karena selain fungsinya untuk mengawasi untuk mengawasi kinerja Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang ada didesa nya, sehingga keluhan dan keiinginan masyarakat dapat tertampung dan juga terkoordinir dalam wadah yang jelas yaitu melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah Desa merupakan lembaga yang memiliki peran dan juga potensi yang cukup besar dalam membangun dan mengelola pemerintahan di desa. Pemerintah Desa selaku eksekutif di desa, berperan aktif dalam menentukan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, Pemerintah Desa harus mampu membangun kemitraan, baik dengan BPD, pihak swasta maupun masyarakat yang ada didesa itu sendiri.

Namun pada akhirnya, pelaksanaan fungsi BPD di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak masih belum optimal. Adapun permasalahaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut adalah sebagai berikut :

1. BPD masih belum optimal dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa Hilir Kantor
2. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD di Desa HIlir Kantor belum maksimal dalam merangkul, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya perhatian dari pemerintah desa dalam pembangunan desa.
3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kerja pemerintah desa.

Desa Hilir Kantor merupakan bagian dari desa yang ada di wilayah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Desa Hilir Kantor sendiri masih memiliki persoalan-persoalan seperti, kurangnya komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan perangkat desa dan masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang aktif dalam melakukan panggilan aspirasi masyarakat, ditambah pula masih ada sikap dari masyarakat yang kurang peduli dan kurang tertarik dengan urusan politik yang ada di desa, dalam hal ini keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakatpun masih belum cukup bearti keberadaannya. Kurangnya sarana dan prasarana yang

mendukung, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Hilir Kantor yang masih kurang

Dalam pelaksanaan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada, masih kurangnya komunikasi antara Badan Permusyawaratan dengan perangkat desa dan masyarakat. Hal tersebut dapat menyebakan tugas dan fungsi BPD menjadi kurang optimal.

Dari uraian diatas merupakan hal yang menarik untuk diangkat menjadi sautu bahan penelitian dengan judul **"Impelemtasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak"**

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Komunikasi antara BPD Desa Hilir Kantor dengan masyarakat kurang optimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Hilir Kantor.
2. Sarana dan prasarana yang masih kurang untuk menjadi penunjang kerja pemerintah desa
3. Tingkat pendidikan anggota BPD Desa Hilir Kantor yang relatif rendah

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, penulis memfokuskan faktor-faktor yang menjadi penghambat Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu; Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Impelemtasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dalam pengembangan ilmu bagi mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Publik khususnya kajian dalam Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1.6.2. Manfaat Praktis

Bagi instansi pemerintahan khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak kiranya penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak pemerintah desa sehingga fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Hilir Kantor menjadi lebih baik.